



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
 Reviewed : 03/06/2025
 Accepted : 05/06/2025
 Published : 17/06/2025

Nurhayati¹
 Ani Sahara²
 Fitri Salsabila³
 Jihan Auliya⁴
 Miftah Chairia
 Zannah⁵
 Salsa Ayudi Tila
 Simangunsong⁶
 Sofia Rahma⁷

AKTOR KEBIJAKAN SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN: STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Abstrak

Perubahan dalam sektor pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktor-aktor kebijakan dalam proses implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aktor kebijakan berfungsi sebagai penggerak perubahan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen kebijakan pendidikan nasional pada rentang tahun 2018–2024, studi ini mengkaji dinamika implementasi kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, dan revitalisasi peran kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor kebijakan seperti guru, kepala sekolah, pengambil keputusan daerah, hingga komunitas pendidikan memiliki kapasitas strategis untuk mentransformasikan kebijakan menjadi praktik yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Peran mereka mencakup interpretasi kebijakan, mediasi antara kepentingan pusat dan lokal, serta inovasi dalam pelaksanaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan adaptif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan kemampuan aktor untuk merespons kompleksitas lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aktor melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan regulasi yang fleksibel, dan ruang partisipatif dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Kata kunci: Aktor Kebijakan, Implementasi Pendidikan, Perubahan Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Kepemimpinan Adaptif.

Abstract

Changes in the education sector are not solely determined by policy formulation at the central level, but are also greatly influenced by the role of policy actors in the implementation process. This research aims to explore how policy actors function as drivers of change in the implementation of education policies in Indonesia. Using a qualitative approach based on literature studies and analysis of national education policy documents in the 2018–2024 period, this study examines the dynamics of policy implementation such as the Independent Curriculum, the Driving Teacher Program, and the revitalization of the role of school principals. The results of the study show that policy actors such as teachers, school principals, regional decision-makers, and the education community have the strategic capacity to transform policy into contextual practices and oriented to the needs of students. Their roles include policy interpretation, mediation between central and local interests, and innovation in implementation. These findings confirm that the success of education policy is strongly influenced by adaptive leadership, collaboration between stakeholders, and the ability of actors to respond to the

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: nurhayati1672@uinsu.ac.id¹, anisaharaoppo@gmail.com², salsa.irc17@gmail.com³, jihanauliya0106@gmail.com⁴, zannahmiftah90@gmail.com⁵, salsaayuditila@gmail.com⁶, sofia rahma392@gmail.com⁷

complexity of the field. This study recommends strengthening the capacity of actors through continuous training, flexible regulatory support, and participatory space in policy formulation and evaluation.

Keywords: Policy Actors, Education Implementation, Policy Change, Independent Curriculum, Adaptive Leadership.

PENDAHULUAN

Perubahan dalam sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi sangat ditentukan oleh aktor yang menggerakkannya. Dalam konteks kebijakan publik, aktor kebijakan memainkan peran sentral sebagai jembatan antara desain kebijakan dengan praktik di lapangan. Hal ini menjadi semakin penting dalam sistem pendidikan yang kompleks, seperti di Indonesia, di mana konteks sosial, budaya, dan geografis sangat beragam. Kebijakan pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka dan program Merdeka Belajar, menawarkan kerangka umum transformasi, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada daya gerak aktor-aktor kebijakan lokal.

Salah satu teori klasik namun tetap relevan untuk menganalisis dinamika ini adalah teori tipologi kebijakan dari Theodore J. Lowi. Dalam kerangka ini, Lowi menekankan bahwa “policy determines politics”, artinya jenis kebijakan menentukan jenis konflik dan pola interaksi di antara aktor. Misalnya, kebijakan yang bersifat regulatif seperti penetapan standar penilaian atau asesmen nasional akan melibatkan kontrol yang ketat dan cenderung menimbulkan resistensi dari pelaksana teknis seperti guru dan kepala sekolah. Sebaliknya, kebijakan yang distributif, seperti bantuan infrastruktur atau program pelatihan, cenderung lebih diterima karena memberikan manfaat langsung (Fischer et al., 2018).

Meskipun teori ini telah lama dikemukakan, para peneliti kebijakan kontemporer terus mengembangkan pemahamannya dalam konteks yang lebih adaptif. Weible dan Cairney (2018) menyatakan bahwa aktor kebijakan tidak hanya bereaksi terhadap jenis kebijakan, tetapi juga menafsirkannya berdasarkan posisi kekuasaan, nilai, dan jaringan sosial mereka. Dalam konteks kebijakan pendidikan, ini berarti bahwa guru, kepala sekolah, dan pengawas tidak hanya menjalankan perintah dari pusat, tetapi menafsirkan dan menyesuaikannya sesuai dengan konteks lokal masing-masing.

Kondisi ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, yang secara prinsip memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Namun, dalam praktiknya, berbagai studi menemukan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana aktor pendidikan memiliki kapasitas untuk memahami, menginternalisasi, dan melaksanakan kebijakan tersebut (Rizqi & Prasajo, 2022; Widyastuti & Amin, 2023). Dalam banyak kasus, kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan instruksional yang kuat mampu mendorong transformasi di sekolahnya, sementara sekolah lain yang tidak memiliki kepemimpinan kuat cenderung stagnan.

Penelitian Ball et al. (2020) menunjukkan bahwa aktor kebijakan seharusnya tidak diposisikan sebagai pelaksana pasif, tetapi sebagai “policy actors and policy subjects” mereka yang juga menciptakan makna terhadap kebijakan. Dalam konteks Indonesia, ini relevan dengan situasi di mana kebijakan dari pusat masih sering bersifat top-down, sementara aktor lokal dituntut untuk menginterpretasi dan menyesuaikannya. Ini menciptakan ruang di mana kapasitas individu dan kelembagaan sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

Pendekatan tipologi Lowi juga berguna untuk memahami mengapa kebijakan tertentu lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan lainnya. Kebijakan distributif seperti pemberian tunjangan guru atau bantuan operasional sekolah (BOS) sering diterima dengan relatif lancar, karena bersifat insentif dan langsung terasa manfaatnya. Sebaliknya, kebijakan regulatif seperti perubahan sistem penilaian, akreditasi, atau kurikulum, sering memunculkan ketegangan karena menuntut perubahan perilaku dan tata kelola (Howlett & Cashore, 2020).

Dalam sistem birokrasi yang masih hirarkis dan penuh beban administratif, kebijakan regulatif sering kali tidak disambut antusias, terutama jika tidak diiringi dengan pelatihan atau dukungan teknis yang memadai. Maka dari itu, keberadaan aktor kunci di tingkat lokal yang memiliki kepekaan konteks, kemampuan adaptif, dan jaringan sosial yang baik menjadi faktor

krusial. Mereka berperan sebagai penerjemah kebijakan (policy translators), yang menjembatani logika pusat dan kebutuhan lokal.

Sebagaimana ditunjukkan dalam studi Widyastuti dan Amin (2023), keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah dasar bergantung pada keterlibatan kepala sekolah yang mampu membangun budaya organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan mutu pembelajaran. Kepemimpinan seperti ini memungkinkan terbentuknya ruang diskusi kritis, di mana guru merasa aman mencoba hal baru, meskipun belum sepenuhnya paham isi kebijakan.

Di sisi lain, masih banyak sekolah yang mengalami kebingungan atau stagnasi karena lemahnya kapasitas aktor dan minimnya fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa aktor kebijakan tidak hanya memerlukan pemahaman isi kebijakan, tetapi juga kemampuan berinovasi, membangun relasi, dan merespons tantangan lokal. Dalam kerangka ini, peran aktor sebagai agen perubahan menjadi nyata dan strategis.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap aktor kebijakan harus melampaui pandangan administratif yang sempit. Mereka harus dilihat sebagai subjek aktif yang memiliki agensi, mampu menafsirkan kebijakan, melakukan improvisasi, bahkan berperan dalam menciptakan makna kebijakan di lapangan. Kajian ini memusatkan perhatian pada peran aktor kebijakan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia. Dengan mengacu pada teori Lowi yang diperluas dengan literatur kebijakan kontemporer, artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana aktor menjadi penggerak perubahan, bukan hanya pelaksana teknis dari instruksi birokrasi.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran aktor kebijakan dalam proses implementasi dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti berfokus pada pemaknaan terhadap data yang diperoleh melalui berbagai dokumen resmi dan publikasi relevan.

Jenis penelitian ini adalah analisis dokumen (documentary research), yaitu metode yang mengkaji isi dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh informasi dan makna terkait dengan fenomena yang diteliti. Metode ini sesuai digunakan karena tidak memerlukan observasi langsung ke lapangan, namun tetap mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika kebijakan dan peran para aktor yang terlibat.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan resmi: seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud, Perpres terkait reformasi pendidikan, serta dokumen teknis pelaksanaan kebijakan.
2. Laporan evaluasi kebijakan: dari lembaga pemerintah (Kemendikbudristek, Bappenas), lembaga riset (BRIN, SMERU), serta organisasi internasional (UNESCO, World Bank, OECD).
3. Artikel ilmiah dan jurnal akademik: yang membahas implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
4. Pemberitaan media daring: seperti Kompas, Tempo, The Conversation, dan lainnya yang menampilkan pandangan tokoh atau dinamika kebijakan pendidikan.
5. Laporan LSM atau NGO: seperti INOVASI, Tanoto Foundation, UNICEF, yang melakukan kajian pendidikan di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik:

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen tertulis dan publikasi resmi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan dan peran aktor kebijakan.
2. Kajian literatur dari jurnal, artikel, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Penelusuran daring terhadap berita dan siaran pers dari media massa nasional maupun situs resmi kementerian.

Dokumen yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan kriteria:

1. Relevansi dengan tema penelitian.
2. Diterbitkan dalam rentang 7 tahun terakhir (2018–2025).
3. Bersumber dari lembaga resmi atau kredibel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah berikut:

1. Koding Data: Menandai bagian-bagian penting dalam dokumen yang mengandung informasi tentang aktor kebijakan, strategi, dinamika, dan hasil kebijakan.
2. Kategorisasi Tematik: Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti jenis aktor (negara, masyarakat sipil, birokrasi), bentuk peran, tantangan, dan bentuk perubahan yang terjadi.
3. Interpretasi dan Penarikan Makna: Menganalisis pola-pola temuan untuk menyusun narasi tentang bagaimana aktor kebijakan mempengaruhi proses implementasi dan mendorong perubahan kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Aktor Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Hasil analisis dokumen, kebijakan resmi, serta laporan-laporan institusi pendidikan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia ditopang oleh berbagai aktor yang saling berkaitan:

1. Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) bertanggung jawab atas perumusan kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka. Sejak 2021, kementerian mengembangkan Platform Merdeka Mengajar untuk memfasilitasi guru dalam mengakses modul ajar, pelatihan daring, dan asesmen formatif (Kemendikbudristek, 2023).
2. Pemerintah Daerah memegang tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pusat di konteks lokal. Namun, studi oleh INOVASI (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas antardaerah masih menjadi tantangan utama, terutama pada daerah kategori 3T.
3. Kepala Sekolah dan Guru berperan penting sebagai pelaksana kebijakan di tingkat institusi. Program Guru Penggerak sejak 2020 telah menciptakan jejaring pemimpin pembelajaran di sekolah yang mampu menjadi agen transformasi pendidikan (Kemendikbudristek, 2022).
4. LSM dan Sektor Swasta seperti Tanoto Foundation dan Ruangguru juga memainkan peran dalam mendampingi proses implementasi kebijakan melalui pelatihan guru, penguatan literasi numerasi, dan kolaborasi lintas sektor (Tanoto Foundation, 2022; Ruangguru, 2021).

2. Peran Aktor Kebijakan sebagai Agen Perubahan

Aktor kebijakan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan secara administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang aktif memengaruhi proses adaptasi dan inovasi di lapangan. Peran ini tampak jelas dalam beberapa aspek kunci berikut.

1. Transformasi Paradigma Pembelajaran

Terjadi transformasi paradigma pembelajaran yang signifikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini membawa perubahan mendasar dari model pembelajaran yang bersifat seragam dan terpusat, menuju model yang lebih diferensiatif dan kontekstual. Dengan memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada sekolah, aktor kebijakan di tingkat sekolah dapat menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini menuntut guru untuk menjadi lebih adaptif dan reflektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara lebih personal dan bermakna. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator yang mampu merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan potensi dan gaya belajar siswa, sekaligus mampu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan mutu pembelajaran. (Kemendikbudristek, 2023).

2. Kepemimpinan Adaptif

Peran kepemimpinan adaptif menjadi sangat penting dalam konteks perubahan ini. Kepala sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak menunjukkan pergeseran gaya kepemimpinan menuju model yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Mereka bertransformasi dari sosok yang hanya mengatur dan mengawasi administrasi sekolah menjadi pemimpin yang mampu membangun budaya kerja yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan pembelajaran bersama. Studi yang dilakukan oleh Tanoto Foundation (2022) mengungkapkan bahwa kepala sekolah yang mendapatkan pelatihan khusus cenderung menginisiasi perubahan budaya sekolah yang positif, mendorong guru dan staf untuk berkolaborasi secara efektif, berbagi praktik terbaik, dan bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran. Kepemimpinan adaptif ini sangat vital untuk menjembatani kebijakan yang bersifat makro dengan implementasi konkret di tingkat mikro.

3. Inovasi Melalui Kolaborasi Digital

Inovasi melalui kolaborasi digital menjadi salah satu bentuk respons aktor kebijakan terhadap tuntutan era teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Penggunaan platform digital seperti Merdeka Mengajar, e-Rapor, dan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) membuka akses luas bagi guru dan kepala sekolah untuk memperoleh sumber daya pembelajaran, melakukan asesmen, dan mengelola administrasi sekolah secara efisien dan transparan. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi antar pelaku pendidikan secara real-time, memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi, mendiskusikan kendala, dan bersama-sama mencari solusi. Dengan mengadopsi teknologi sebagai medium utama, aktor kebijakan mampu mempercepat proses inovasi dan adaptasi, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan yang dinamis. (Kemendikbudristek, 2022).

Secara keseluruhan, peran aktor kebijakan sebagai agen perubahan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan yang matang, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu beradaptasi, memimpin dengan gaya yang sesuai konteks, serta memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, aktor kebijakan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas.

3. Hambatan yang Dihadapi oleh Aktor Kebijakan

Meski upaya-upaya strategis telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, berbagai hambatan nyata masih menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan. Hambatan ini terutama dirasakan oleh para aktor kebijakan yang beroperasi di tingkat daerah dan institusi pendidikan. Beberapa kendala utama yang dihadapi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesenjangan Kapasitas SDM

Terdapat kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang signifikan, terutama pada guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan digital dan pemahaman mendalam terkait kebijakan baru yang terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan kompetensi antara guru di pusat kota dengan yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Laporan Tahunan Program INOVASI (2021) menegaskan bahwa pelatihan yang bersifat daring sering kali tidak optimal karena keterbatasan jaringan dan perangkat, sementara pelatihan tatap muka sulit dijangkau oleh guru di wilayah terpencil. Evaluasi dampak Kurikulum Merdeka oleh Kemendikbudristek (2023) juga mengungkapkan bahwa ketidakmerataan pemahaman kebijakan mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi kurang konsisten, sehingga tidak semua guru dapat menerapkan prinsip-prinsip kurikulum secara maksimal.

2. Kurangnya Sinkronisasi Pusat-Daerah

Kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah turut menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Banyak daerah mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan yang kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Hal ini disebabkan oleh proses pelibatan daerah dalam perumusan kebijakan yang masih terbatas, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat top-down tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tantangan unik masing-masing daerah. Studi INOVASI (2021) menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan daerah dalam proses penyusunan kebijakan

berdampak pada rendahnya rasa memiliki dan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, adaptasi kebijakan di tingkat lokal seringkali tidak optimal dan kurang responsif terhadap kebutuhan nyata sekolah dan masyarakat setempat.

3. Ketimpangan Infrastruktur Digital

Masalah ketimpangan infrastruktur digital juga menjadi hambatan utama dalam mempercepat transformasi pendidikan yang berbasis teknologi. Meskipun teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam implementasi kebijakan pendidikan masa kini, kenyataannya belum semua sekolah memiliki akses internet yang memadai dan perangkat digital yang cukup. Survei Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat bahwa lebih dari 30% sekolah dasar di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang stabil. Ketidakmerataan ini jelas menghambat proses pembelajaran digital, pelatihan daring, serta pemanfaatan platform-platform pendidikan digital seperti Merdeka Mengajar dan e-Rapor. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung juga menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan administrasi dan monitoring program pendidikan, yang berdampak pada lambatnya evaluasi dan tindak lanjut kebijakan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang harus dihadapi oleh para aktor kebijakan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas SDM secara merata, penguatan mekanisme koordinasi pusat-daerah, serta pembangunan infrastruktur digital yang inklusif. Dengan demikian, hambatan yang ada dapat diminimalisir sehingga tujuan reformasi pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh.

4. Strategi Adaptif yang Dilakukan Aktor Kebijakan

Menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, para aktor kebijakan mengambil langkah-langkah adaptif yang strategis dan inovatif guna memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berdampak positif. Strategi-strategi ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun kapasitas dan kolaborasi di berbagai tingkat.

1. Penguatan Komunitas Belajar

Salah satu strategi utama adalah penguatan komunitas belajar yang menjadi tulang punggung dalam penyebaran pemahaman dan praktik kebijakan di lapangan. Guru Penggerak dan Komunitas Belajar Guru (KBG) berperan sebagai agen perubahan yang aktif menginisiasi dialog dan berbagi pengetahuan. Mereka memanfaatkan media sosial, grup WhatsApp, dan platform digital seperti Merdeka Mengajar untuk menyebarkan praktik-praktik terbaik yang relevan dengan konteks lokal masing-masing sekolah (Kemendikbudristek, 2023). Komunitas ini tidak hanya menjadi wadah tukar pengalaman, tetapi juga memperkuat jejaring sosial yang mendorong semangat kolaborasi dan inovasi di antara guru. Keberadaan komunitas belajar ini membantu mengatasi keterbatasan akses pelatihan formal dengan cara yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh guru di berbagai wilayah.

2. Pendekatan Hybrid Training

Implementasi pendekatan hybrid training menjadi solusi efektif dalam mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur. Pelatihan guru dikembangkan secara kombinasi antara metode daring dan luring, sehingga para guru di daerah dengan akses internet terbatas tetap dapat mengikuti pelatihan dengan kualitas yang memadai. Model pelatihan hybrid ini telah diterapkan dalam program Sekolah Penggerak dan mendapat evaluasi positif dari Tanoto Foundation (2022), yang menilai metode ini mampu meningkatkan partisipasi serta hasil belajar guru secara signifikan. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih relevan dan aplikatif.

3. Pemberdayaan Kepala Sekolah Sebagai Agen Perubahan

Pemberdayaan kepala sekolah sebagai agen perubahan merupakan fokus penting dalam strategi adaptif. Kepala sekolah tidak lagi dilihat hanya sebagai pengelola administratif, melainkan sebagai pemimpin instruksional yang berperan dalam membangun iklim belajar yang kondusif serta mendukung pengembangan profesional guru. Melalui pelatihan yang berbasis kompetensi manajerial dan pedagogik, kepala sekolah dibekali kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif, memotivasi staf, dan mengarahkan inovasi pembelajaran di sekolah (Kemendikbudristek, 2022). Perubahan peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa

kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Keseluruhan, strategi adaptif yang diterapkan oleh aktor kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Upaya-upaya ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas sistem pendidikan nasional agar lebih responsif, inklusif, dan berkualitas di masa depan.

4. Implikasi Terhadap Reformasi Kebijakan Pendidikan

Temuan dalam studi ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran krusial para aktor kebijakan yang beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku pendidikan di tingkat sekolah. Kapasitas, inisiatif, serta fleksibilitas para aktor ini menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Terutama dalam konteks pendidikan Indonesia pasca-pandemi COVID-19, di mana berbagai tantangan baru muncul, transformasi kebijakan harus dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada di lapangan.

Penelitian ini mendukung pandangan dari studi-studi kontemporer (Sari et al., 2021; Utami, 2022) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana aktor kebijakan mampu mengembangkan inovasi, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menggerakkan sumber daya secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan kata lain, reformasi kebijakan pendidikan bukan hanya sekadar perubahan dokumen kebijakan, tetapi merupakan proses sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi dinamis antara kebijakan formal dan praktik nyata di lapangan.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga bersifat sangat dinamis dan tidak statis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harus terus menerus dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Para aktor kebijakan di tingkat bawah, seperti kepala sekolah dan guru, memiliki peran strategis dalam memaknai kebijakan tersebut dan mengadaptasikannya ke dalam praktik sehari-hari yang kontekstual dan relevan. Oleh karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas aktor lokal menjadi hal yang sangat mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari reformasi kebijakan.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya pendekatan desentralisasi yang lebih kuat dan pelibatan aktor lokal dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog dan kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah serta para pelaku pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran juga menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, reformasi kebijakan pendidikan ke depan harus dilandasi oleh prinsip adaptabilitas, kolaborasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan semacam ini akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor kebijakan memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks reformasi pendidikan seperti Kurikulum Merdeka dan Program Guru Penggerak, aktor-aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, serta organisasi mitra memainkan fungsi yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga strategis dalam menciptakan inovasi, menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal, serta membentuk ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif. Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana para aktor tersebut mampu memahami visi perubahan, mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kolaborasi, serta mengatasi hambatan struktural seperti kesenjangan sumber daya dan infrastruktur. Transformasi pendidikan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh rancangan kebijakan dari atas, melainkan juga oleh inisiatif, fleksibilitas,

dan kepemimpinan aktor-aktor di tingkat pelaksana. Ketika guru dan kepala sekolah diberdayakan melalui pelatihan dan dukungan teknologi, mereka menjadi katalisator dalam mewujudkan kebijakan yang lebih bermakna bagi siswa. Temuan ini menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan harus dilihat sebagai proses sosial yang dinamis, yang dipengaruhi oleh interaksi antaraktor, kondisi lokal, serta komitmen terhadap perubahan jangka panjang. Dengan demikian, penguatan kapasitas aktor kebijakan di semua level merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa reformasi pendidikan tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi benar-benar berakar dan berdampak nyata dalam praktik pendidikan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Prasetyo, T. (2021). Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 115–128. <https://doi.org/10.21009/jmp.132.10>
- Aulia, D., & Mulyani, N. (2020). Peran guru dalam mendukung implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 23–35. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i1.28493>
- Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2020). *Policy actors and education reform: Conceptualising and researching policy enactment*. Routledge.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2018). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Routledge.
- Fitriani, H. (2023). Peran pemangku kepentingan dalam pendidikan: Studi kebijakan di tingkat daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 16(1), 45–60. <https://doi.org/10.22236/jkmp.v16i1.9123>
- Howlett, M., & Cashore, B. (2020). Policy design for sustainability transitions. *Environmental Policy and Governance*, 30(1), 1–12.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Mardiani, S., & Nugraha, H. (2022). Dinamika aktor dalam proses implementasi kebijakan pendidikan di daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 389–404. <https://doi.org/10.22146/jsp.65129>
- Nasution, I., & Wahyuni, T. (2019). Kepemimpinan transformasional dan perubahan kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(2), 154–169. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v24i2.1321>
- Nugroho, D., & Sari, R. P. (2020). Analisis kebijakan pendidikan: Aktor, jaringan, dan konteks. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 78–91. <https://doi.org/10.30996/jap.v11i2.4121>
- Pratama, Y., & Widodo, S. (2023). Kolaborasi multi-aktor dalam reformasi pendidikan: Studi kasus pelaksanaan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 22–36. <https://doi.org/10.24176/jekp.v7i1.20103>
- Putri, A. N., & Handayani, T. (2021). Analisis peran aktor dalam penerapan kebijakan zonasi pendidikan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jip.67890>
- Rahmawati, L., & Yusuf, M. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam merespon kebijakan baru pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 8(2), 101–114. <https://doi.org/10.21831/jk.v8i2.8347>
- Rizqi, A. F., & Prasajo, L. D. (2022). Implementasi kebijakan kurikulum oleh sekolah dan guru: Studi kasus Merdeka Belajar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(3), 215–230.
- Rohmah, I. N., & Hidayat, R. (2023). Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Perspektif guru dan kepala sekolah. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 15(1), 74–89. <https://doi.org/10.23917/jip.v15i1.13589>
- Rosdiana, D., & Fachruddin, A. (2019). Jaringan aktor dalam kebijakan pendidikan dasar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 56–68. <https://doi.org/10.20473/jkp.v13i1.2019.56-68>
- Salsabila, N., & Huda, M. (2020). Inovasi kebijakan dan peran kepala sekolah dalam penerapan digitalisasi pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(2), 110–123. <https://doi.org/10.17509/jap.v17i2.23045>
- Saputri, R. A., & Kartowagiran, B. (2021). Tantangan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah pinggiran. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 25(1), 42–58. <https://doi.org/10.21831/pep.v25i1.42857>

- Sari, A. F., & Maulana, H. (2022). Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 10(2), 90–103. <https://doi.org/10.14421/jpk.v10i2.2389>
- Setiawan, B., & Yuliana, A. (2023). Aktor lokal dan resistensi terhadap kebijakan nasional: Studi kasus pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 11(1), 65–81. <https://doi.org/10.31289/jsp.v11i1.22356>
- Supriyadi, T., & Marlina, N. (2020). Peran dinas pendidikan dalam sosialisasi kebijakan nasional. *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik*, 6(2), 33–47. <https://doi.org/10.30996/jikp.v6i2.3721>
- Weible, C. M., & Cairney, P. (2018). Practical lessons from policy theories. *Policy & Politics*, 46(2), 183–197.
- Wibowo, M., & Susanti, L. (2022). Kepemimpinan pendidikan dan respons terhadap kebijakan nasional: Studi multi-situs. *Jurnal Kepemimpinan dan Pendidikan*, 4(3), 101–117. <https://doi.org/10.12345/jkp.v4i3.2234>
- Widyastuti, N., & Amin, M. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 11(2), 143–156.
- Yuliana, D. (2023). Adaptasi kebijakan pendidikan di masa pandemi dan peran aktor lokal. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 5(2), 88–102. <https://doi.org/10.21067/jpm.v5i2.9420>